

SEMNASIA**(Seminar Nasional Ilmu Administrasi)**

“Membangun Bangsa Melalui Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Perdesaan”
 25 Mei 2025, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

Strategi Dinas Tenaga Kerja dalam Mengurangi angka pengangguran di Provinsi Banten

Khaeria Ali ^a dan Agus Lukman Hakim ^b

^{a,b} Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

e-mail : ^akhaeria1576@gmail.com^baguslukman.hakim@stiabanten.ac.id

Abstrak

Tingginya angka pengangguran merupakan salah satu permasalahan krusial di Provinsi Banten yang memerlukan penanganan strategis dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh Dinas Tenaga Kerja dalam upaya mengurangi angka pengangguran di wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, observasi, dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten mengimplementasikan berbagai program, seperti pelatihan vokasional berbasis kompetensi, sertifikasi keahlian, penyuluhan karir, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan industri. Selain itu, pengembangan kewirausahaan dan digitalisasi informasi pasar kerja turut menjadi bagian dari strategi komprehensif yang diterapkan. Meskipun demikian, tantangan seperti keterbatasan akses pelatihan di daerah terpencil dan rendahnya minat terhadap pendidikan vokasional masih menjadi hambatan yang harus diatasi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sinergi antarstakeholder dan evaluasi berkala terhadap efektivitas program yang dilaksanakan.

Kata Kunci: Strategi; Dinas Ketenagakerjaan; Angka Pengangguran

Abstract

The high unemployment rate is one of the crucial problems in Banten Province that requires strategic and sustainable handling. This study aims to analyze the strategies implemented by the Manpower Office in an effort to reduce unemployment in the region. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through literature studies, observations, and interviews with related parties. The results of the study show that the Banten Provincial Manpower Office implements various programs, such as competency-based vocational training, skills certification, career counseling, and strengthening partnerships with the business world and industry. In addition, entrepreneurship development and digitization of labor market information are also part of the comprehensive strategy implemented. However, challenges such as limited access to training in remote areas and low interest in vocational education are still obstacles that must be overcome. This study recommends increasing synergy between stakeholders and periodic evaluation of the effectiveness of the programs implemented.

Keywords: Strategy; Department of Manpower; Unemployment Rate

SEMNASIA

(Seminar Nasional Ilmu Administrasi)

“Membangun Bangsa Melalui Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Perdesaan”
25 Mei 2025, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

A. PENDAHULUAN

Pada era swatantra daerah saat ini, data mengenai syarat ekonomi suatu wilayah sebagai sangat krusial sebagai dasar dalam merancang taktik pembangunan daerah. keliru satu pendekatan yang dapat digunakan buat merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi daerah artinya dengan memanfaatkan potensi sektor-sektor unggulan yang mempunyai orientasi pada pengembangan daerah. taktik yg diklaim efektif serta relevan dalam konteks ini artinya penerapan kebijakan pengembangan ekonomi lokal, yg menitikberatkan di sektor-sektor prioritas unggulan pada wilayah tadi (Randi, 2021). Pembangunan wilayah mampu diarahkan melalui optimalisasi sektor-sektor unggulan yg mampu menekan nomor kemiskinan serta pengangguran, termasuk di Provinsi Banten. (Randi, 2021). Permasalahan pengangguran dan kemiskinan masih menjadi tantangan besar bagi Provinsi Banten. Padahal, daerah ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan potensi ekonomi di berbagai sektor. Namun demikian, tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan angka kemiskinan justru menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. (Rahmatullah & Khaerudin, 2021). Namun selama beberapa tahun terakhir tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten mengalami penurunan, hal tersebut dapat dilihat dalam data yang disajikan sebagai berikut:

Gambar 1.1

Tingkat Pengangguran Terbuka Banten 2025



Sumber : BPS Provinsi Banten, 2025
Berdasarkan Berita Resmi Statistik No. 25/05/36/Th. XIX pada 5 Mei 2025 Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Banten pada periode Februari 2025 turun 0,38 persen menjadi 6,64 persen dibanding periode Februari 2024 yang mencapai 7,02 persen. Pada Februari 2025, BPS Provinsi Banten menyatakan, TPT laki-laki sebesar 6,65 persen, sedangkan untuk TPT

perempuan yang sebesar 6,63 persen. TPT laki-laki dan perempuan memiliki pola yang sama yaitu turun dibandingkan Februari 2024, masing-masing sebesar 0,30 persen poin dan 0,51 persen poin. Sementara TPT berdasarkan tempat tinggal, data BPS Provinsi Banten menunjukkan, TPT perkotaan (6,65 persen) lebih tinggi dibandingkan TPT di daerah perdesaan (6,62 persen). Dibandingkan Februari 2024, TPT perkotaan dan perdesaan mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,45 persen poin dan 0,16 persen poin. Untuk jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Februari 2025 sebanyak 6,21 juta orang, naik 163,93 ribu orang dibanding Februari 2024. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,87 persen poin dibanding Februari 2024. Sedangkan untuk penduduk yang bekerja pada Februari 2025 sebanyak 5,80 juta orang, atau mengalami kenaikan sebanyak 175,91 ribu orang dari Februari 2024. Lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah Konstruksi sebesar 113,77 ribu orang. Data BPS Provinsi Banten itu menunjukkan, pada Februari 2025 sebanyak 3,10 juta orang (53,37 persen) bekerja pada kegiatan formal atau naik sebesar 3,11 persen poin dibanding Februari 2024. Terkait dengan persentase setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu pada Februari 2025 turun masing-masing sebesar 1,77 persen poin dan 1,88 persen poin dibanding Februari 2024. (Tangerang Pos.id).

Hal tersebut dapat terjadi karena terdapat beberapa strategi yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Banten diantaranya melalui Konsep Perencanaan tenaga kerja dapat mempunyai definisi berbagai macam, dimana kesemuanya pada dasarnya memiliki pengertian yang sama. Menurut undang-undang No.13 Tahun 2003, perencanaan tenaga kerja didefinisikan sebagai proses penyusutan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program ketenagakerjaan yang berkesinambungan. (Agusalim, 2022).

Selanjutnya peneliti mengkaji ulang dengan meruntutkan pemetaan berbagai strategi dalam mengurangi angka kemiskinan pada titik yaitu berfokus pada Provinsi Banten, sesuai dengan

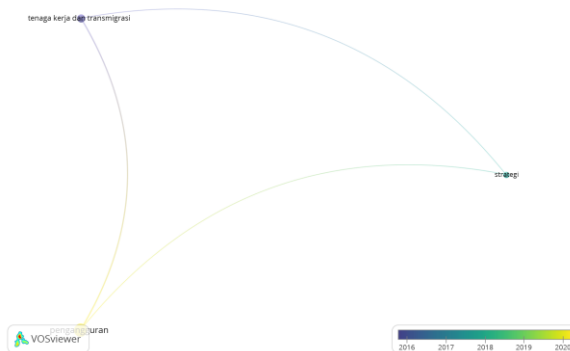
SEMNASIA

(Seminar Nasional Ilmu Administrasi)

“Membangun Bangsa Melalui Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Perdesaan”
25 Mei 2025, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

apa yang telah ditampilkan melalui VOSviewer sebagai berikut :

Gambar 1.2
Fokus Kajian Peneliti



Sumber : Peneliti 2025

Ketiga istilah ini menjadi kata kunci utama dalam kajian atau publikasi ilmiah yang dianalisis. Masing-masing mewakili topik penting yang sering muncul dan saling berhubungan. Dengan lebih menitikberatkan pada strategi-strategi baru dalam penanganan pengangguran, menunjukkan adanya pergeseran fokus dari kajian lama yang lebih menekankan aspek ketenagakerjaan dan transmigrasi.

B. PEMBAHASAN

1. Peran Dinas Tenaga Kerja dalam Mengurangi Pengangguran

Menurut (Randi, 2021). Dinas Tenaga Kerja berperan dalam Perpindahan penduduk usia kerja yang memiliki keterampilan dari daerah tertinggal ke daerah yang lebih maju. Kebijakan awam berkaitan dengan upaya menciptakan syarat yang mendukung buat memperluas serta menciptakan lapangan kerja. sang sebab itu, kebijakan ini perlu dikembangkan secara selaras, terpadu, serta saling mendukung agar tujuan tadi tercapai yang produktif dan remuneratif yang antara lain:

- Menyusun perencanaan tenaga kerja daerah sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
- Mendorong penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan investasi.
- Menumbuhkan lingkungan investasi yang kondusif dan stabil.

- Melakukan pembaruan terhadap program-program ekspansi lapangan kerja, mirip penyediaan kredit mikro, pengembangan usaha mungil serta menengah (UKM), dan acara penanggulangan kemiskinan.
- Menyempurnakan kebijakan yang mendukung fungsi pasar energi kerja, keliru satunya dengan memperkuat sistem informasi ketenagakerjaan.
- Menyediakan data pasar kerja yang seksama menggunakan mengoptimalkan kiprah Bursa Kerja Online dan memperluas distribusi informasinya kepada masyarakat.
- Menguatkan kiprah lembaga terkait dan mempertinggi koordinasi antara instansi, baik pada taraf sentra maupun daerah, buat memaksimalkan aplikasi acara ketenagakerjaan mirip penciptaan lapangan kerja baru, pendidikan, dan pelatihan keterampilan. (Agusalim, 2022).

2. Program Pelatihan dan Peningkatan Keterampilan (Skill Development)

Dinas Tenaga Kerja di berbagai daerah Indonesia secara aktif menyelenggarakan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kerja masyarakat. Program-program ini mencakup pelatihan vokasional, pelatihan berbasis kompetensi, dan sertifikasi keahlian yang dirancang agar peserta siap bersaing di dunia kerja atau memulai usaha mandiri. Berikut adalah beberapa contoh program pelatihan yang telah dilaksanakan:

- Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK)**
PBK dirancang untuk memberikan keterampilan praktis sesuai standar industri. Program ini menekankan pada penerapan langsung di lapangan agar peserta siap bekerja dan beradaptasi di dunia profesional.
- Pelatihan Vokasional dan Sertifikasi Keahlian**
Program ini bertujuan untuk memberikan keterampilan spesifik dan sertifikasi yang diakui secara nasional.
- Pelatihan untuk Penempatan Kerja dan Magang Internasional**
Beberapa daerah juga mempersiapkan peserta untuk peluang kerja di luar negeri diantaranya termasuk wilayah Provinsi Banten. (nisa, 2019).

SEMNASIA

(Seminar Nasional Ilmu Administrasi)

“Membangun Bangsa Melalui Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Perdesaan”
25 Mei 2025, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

3. Penyuluhan dan Edukasi Karir

Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten mengadakan program "Career Day" bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk mengenalkan dunia kerja sejak dini dan menumbuhkan minat pada pelatihan vokasional. Di beberapa daerah seperti Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang, penyuluhan ini dilaksanakan langsung ke desa-desa dengan menyasar kalangan usia produktif yang belum bekerja. (nisa, 2019).

4. Kolaborasi dengan Sektor Swasta dan Industri

Meningkatnya investasi asing menyampaikan kontribusi terhadap terciptanya lapangan dan peluang kerja baru. Ketertarikan para investor terhadap perusahaan-perusahaan di Kabupaten Serang relatif tinggi, yang terlihat berasal berkembangnya kawasan industri di Kecamatan Cikande. daerah ini sebagai lokasi berbagai jenis perusahaan yg memproduksi barang buat kebutuhan pasar domestik maupun ekspor. kondisi ini tentu menjadi pujian tersendiri bagi wilayah serta berkontribusi di peningkatan pendapatan asli daerah. Lokasi industri yang strategis menjadi galat satu alasan utama investor menanamkan modalnya. Kedekatan Kabupaten Serang dengan Jakarta menjadi sentra pemerintahan serta ekonomi pula sebagai faktor krusial yang mempengaruhi besarnya arus investasi ke wilayah tersebut. Keunggulan geografis dan jumlah industri yang cukup poly mengakibatkan Kabupaten Serang sebagai tujuan potensial bagi para penanam modal. (Mahroji & Nurkhasanah, 2019)

5. Peningkatan Akses ke Layanan Penempatan Kerja

Kegiatan ekonomi yang belum mampu menyerap seluruh angkatan kerja yang ada. Peningkatan kualitas angkatan kerja khususnya usia muda akan memberikan kontribusi dalam mengubah struktur penduduk golongan berpendidikan rendah ke pendidikan yang lebih tinggi. Peningkatan mutu pendidikan tidak hanya berdampak di kualitas asal daya manusia,

tetapi pula turut mendorong produktivitas. pada konteks reformasi serta globalisasi waktu ini, pembangunan sektor pendidikan menjadi kunci untuk mengurangi pengangguran melalui pengembangan sdm yg mempunyai daya saing tinggi, mampu membuat produk-produk unggulan, serta responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kebijakan ketenagakerjaan yang fokus pada ekspansi akses terhadap pekerjaan adalah langkah strategis buat membangun lapangan kerja yg tidak hanya banyak, namun pula produktif dan layak secara ekonomi. Tujuan berasal kebijakan ini bukan sekadar menekan angka pengangguran, namun jua membangun pekerjaan menggunakan penghasilan yang cukup buat menaikkan tingkat hidup para pekerja dan keluarganya. Proses penciptaan serta ekspansi lapangan kerja ini dipengaruhi oleh majemuk faktor, mirip ketersediaan investasi, potensi asal daya alam, dan semangat kewirausahaan rakyat.

Tanggung jawab membentuk lapangan kerja tidak hanya berada di tangan forum pemerintah yang menangani ketenagakerjaan, melainkan pula menjadi tugas beserta lintas sektor, termasuk pihak partikelir, institusi pendidikan tinggi, serta warga umum yang peka terhadap peluang usaha. Permintaan energi kerja sangat ditentukan sang pertumbuhan unit-unit perjuangan produktif dalam berbagai sektor dan skala, yang memerlukan energi kerja menjadi komponen utama pada proses produksi. di sisi lain, ketersediaan energi kerja ditentukan oleh sejauh mana mereka dibekali menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yg sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, kebijakan tersebut harus pula dapat mencakup seluruh wilayah Provinsi Banten dengan efektivitas yang sama serta mampu menggerakkan dan merangkul. (Agusalim, 2022).

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

1. Penutup

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap berbagai strategi yang dijalankan oleh Dinas Tenaga Kerja di

SEMNASIA

(Seminar Nasional Ilmu Administrasi)

“Membangun Bangsa Melalui Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Perdesaan”
25 Mei 2025, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

Provinsi Banten, dapat disimpulkan bahwa upaya pengurangan angka pengangguran telah dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif. Strategi-strategi tersebut mencakup penyediaan pelatihan vokasional berbasis kompetensi, fasilitasi program pemagangan, penyuluhan dan edukasi karir, serta kemitraan dengan sektor industri dan swasta.

Namun demikian, tantangan seperti kesenjangan antara kebutuhan industri dan keterampilan pencari kerja, kurangnya literasi digital, serta rendahnya minat terhadap pendidikan vokasional masih menjadi hambatan signifikan. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi dan kolaborasi lebih lanjut guna memastikan program-program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan.

2. Rekomendasi

- a. **Penguatan Kolaborasi dengan Dunia Usaha dan Industri (DUDI)**
Dinas Tenaga Kerja perlu meningkatkan kemitraan dengan pelaku industri dalam penyusunan kurikulum pelatihan dan penyediaan tempat magang, agar kompetensi lulusan pelatihan lebih sesuai dengan kebutuhan riil pasar kerja.
- b. **Digitalisasi Pelatihan dan Akses Informasi:**
Mengembangkan platform pelatihan daring berbasis kompetensi serta portal informasi pasar kerja yang mudah diakses oleh masyarakat, terutama generasi muda dan masyarakat desa.
- c. **Peningkatan Akses terhadap Pendidikan Vokasional:**
Perluasan jaringan Balai Latihan Kerja (BLK) di setiap kabupaten/kota dengan program yang menyesuaikan potensi lokal dan tren industri.
- d. **Optimalisasi Program Wirausaha Mandiri:**

Mendorong penciptaan lapangan kerja baru dengan mendukung lulusan pelatihan untuk berwirausaha melalui pelatihan kewirausahaan, pendampingan bisnis, dan fasilitasi akses permodalan.

e. **Monitoring dan Evaluasi Berkala:**

Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas program pelatihan dan penyuluhan yang dilaksanakan agar dapat dilakukan perbaikan secara tepat waktu dan berkelanjutan.

f. **Kampanye Kesadaran Karir Sejak Dini:**

Mengadakan program edukasi karir dan promosi pendidikan vokasional di sekolah-sekolah, agar siswa memiliki perspektif realistis dan kompetitif dalam menghadapi dunia kerja.

REFERENSI

- Agusalim, Lestari. (2022). *Perencanaan Ketenagakerjaan: Upaya Pengentasan Pengangguran di Provinsi Banten*.
- nisa, khaerun. (2019). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Dalam Menanggulangi Pengangguran Di Kabupaten Serang Provinsi Banten. *Asdaf Kabupaten Serang, Provinsi Banten Program Studi Kebijakan Publik*, 18.
- Rahmatullah, Asep, & Khaerudin, Dedy. (2021). Analisis Dampak Ketidakterdediaan Industri Terhadap Peningkatan Angka Pengangguran dan Urbanisasi di Kabupaten Pandeglang Banten. *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo*, 7(1), 60.
<https://doi.org/10.35906/jm001.v7i1.728>
- Randi, Mamola. (2021). Strategi Pengembangan Wilayah Melalui Analytical Hierarchy Process (AHP) Dengan Pendekatan Sectoral Economic Analysis Di Provinsi Banten. *Inspire Journal: Economics and Development Analysis*, 1 No.1, 16.
- Tangerang Pos.id. (n.d.). Tangerang Banten.